



Strategi Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam Mendorong Akses Pendanaan Hijau bagi Komunitas Berbasis Lingkungan

INFO PENULIS

M. Ibnu Muhadzib Zaki Nurachman
Universitas Muhammadiyah Jakarta
imuhadzib@gmail.com
+6285780746889

Ramlan Nugraha
Pusat Telaah dan Informasi Regional
ramlan@pattiro.org
+62 813-2256-4856

Tati
Universitas Muhammadiyah Jakarta
tati@umj.ac.id
+62 896-4896-1573

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 2, Agustus 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Nurachman, M. I. M. Z., Nugraha, R., & Tati. (2026). Strategi Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam Mendorong Akses Pendanaan Hijau bagi Komunitas Berbasis Lingkungan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2588-2596.

Abstrak

Perubahan iklim mendorong perlunya penerapan *green governance* yang menekankan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya akses komunitas berbasis lingkungan terhadap skema pendanaan hijau akibat rendahnya kapasitas kelembagaan, administrasi, dan penyusunan proposal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pendampingan PATTIRO sebagai organisasi masyarakat sipil dalam mendorong akses pendanaan hijau melalui Program *Small Grant* Indonesia FOLU Net Sink 2030. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana serta diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendampingan PATTIRO dilakukan secara sistematis melalui sosialisasi program, *coaching clinic*, pendampingan penyusunan proposal, penguatan administrasi kelembagaan, hingga pendampingan finalisasi pengajuan proposal. Strategi tersebut berhasil meningkatkan kapasitas komunitas dalam mengakses pendanaan hijau, yang ditunjukkan dengan keberhasilan 15 dari sekitar 30 komunitas dampingan memperoleh pendanaan pada Program *Small Grant* FOLU Net Sink 2030 Tahap IV. Meskipun demikian, proses pendampingan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas penyusunan proposal, legalitas kelembagaan, serta akses informasi dan infrastruktur digital, terutama pada komunitas di wilayah 3T. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PATTIRO berperan sebagai *intermediary institution* dalam implementasi *green governance* dengan menjembatani komunitas dan penyedia pendanaan, memperkuat kapasitas masyarakat, serta mendorong tata kelola pendanaan hijau yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi pendampingan, *green governance*, pendanaan hijau, organisasi masyarakat sipil, *Small Grant* FOLU Net Sink 2030

Abstract

Climate change has encouraged the implementation of *green governance*, which emphasizes collaboration among stakeholders to support sustainable development. One of the major challenges is the limited access of environmental community groups to green financing schemes due to inadequate institutional capacity, administrative readiness, and proposal-writing skills. This study aims to analyze PATTIRO's mentoring strategy as a civil society organization in expanding access to green financing through the Indonesia FOLU Net Sink 2030 *Small Grant* Program. This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana with source and method triangulation to ensure validity. The findings indicate that PATTIRO implemented a systematic mentoring strategy consisting of program socialization, proposal writing *coaching clinics*, institutional administrative strengthening, and assistance in proposal finalization and submission. This strategy successfully enhanced the capacity of community groups to access green financing, as reflected in the success of 15 out of approximately 30 assisted communities in securing funding under the Phase IV Indonesia FOLU Net Sink 2030 *Small Grant* Program. However, several challenges remain, including limited proposal-writing capacity, incomplete institutional legality, and inadequate access to information and digital infrastructure, particularly among communities in Indonesia's disadvantaged, frontier, and outermost (3T) regions. The study concludes that PATTIRO plays a strategic role as an *intermediary institution* in implementing *green governance* by bridging communities with funding providers, strengthening community capacity, and promoting a more inclusive, participatory, and sustainable green financing governance system.

Key Words: Mentoring strategy, *green governance*, green financing, civil society organization, FOLU Net Sink 2030 *Small Grant*.

A. Pendahuluan

Perubahan iklim telah berkembang menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan global karena dampaknya yang semakin luas terhadap keberlanjutan lingkungan, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai persoalan seperti peningkatan suhu global, degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan konvensional tidak lagi memadai dalam menjawab krisis lingkungan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya paradigma *green governance*, yaitu tata kelola pembangunan yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dari proses pengambilan kebijakan melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat. *Green governance* tidak hanya berorientasi pada penyusunan kebijakan lingkungan, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta pengelolaan sumber daya dan pembiayaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, implementasi tata kelola lingkungan hidup memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, keberlanjutan, partisipatif, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*). Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kerangka *green governance*, *green financing* menjadi salah satu instrumen strategis untuk memastikan tersedianya sumber daya keuangan bagi berbagai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. *Green financing* diarahkan untuk mendukung investasi dan kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *net zero emission* (Pratama & Firmansyah, 2024).

Green financing merupakan pendekatan pendanaan yang menggabungkan tujuan ekonomi dengan perlindungan lingkungan melalui dukungan terhadap berbagai kegiatan yang berkontribusi terhadap keberlanjutan ekologi. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai persoalan lingkungan yang muncul akibat aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, *green financing* tidak hanya

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan (Cahyani, 2024).

Penguatan implementasi *green financing* di Indonesia juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yang menjadi dasar pengembangan berbagai mekanisme pendanaan lingkungan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca melalui keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam implementasinya, *green financing* tidak hanya diwujudkan melalui instrumen keuangan formal, tetapi juga melalui berbagai bentuk dukungan pendanaan yang ditujukan untuk memperkuat inisiatif lingkungan berbasis masyarakat. Berbagai program konservasi, rehabilitasi ekosistem, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi hijau membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Efektivitas pendanaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber pendanaan yang tersedia (Sari et al, 2024).

Sebagai respons terhadap perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% melalui upaya sendiri dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional sebagaimana tercantum dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC). Untuk mencapai target tersebut, Indonesia diperkirakan membutuhkan pendanaan iklim sebesar USD282 miliar. Besarnya kebutuhan pendanaan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target pembangunan rendah karbon tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme *multi-stakeholder governance*. Namun demikian, berbagai skema pendanaan hijau yang telah tersedia belum sepenuhnya dapat diakses oleh komunitas berbasis lingkungan karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan informasi, rendahnya kapasitas penyusunan proposal, minimnya pemahaman terhadap mekanisme pendanaan, serta lemahnya jejaring kelembagaan.

Salah satu implementasi komitmen tersebut diwujudkan melalui agenda *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*, yaitu kondisi ketika sektor kehutanan dan penggunaan lahan ditargetkan mampu menyerap emisi lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada tahun 2030. Pencapaian target tersebut memerlukan dukungan pembiayaan, kolaborasi multipihak, serta penguatan kapasitas masyarakat agar berbagai program konservasi dan rehabilitasi lingkungan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan skema pendanaan hijau saja belum cukup untuk mewujudkan prinsip *green governance*. Diperlukan aktor yang mampu menjembatani hubungan antara penyedia dana dengan komunitas penerima manfaat sehingga akses terhadap pendanaan menjadi lebih inklusif, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks ini, *civil society organizations* memiliki posisi strategis sebagai *intermediary institution* yang tidak hanya melakukan advokasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat, membangun jejaring kolaborasi, serta memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya pembangunan (Rahman et al., 2023).

Peran *civil society organizations* menjadi semakin penting karena keberhasilan berbagai program lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat lokal. Komunitas yang memperoleh akses terhadap informasi, pendampingan, serta penguatan kapasitas memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan program lingkungan yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim (Rusanda et al., 2025). Selain meningkatkan partisipasi, *civil society organizations* juga berfungsi membangun kapasitas kelembagaan komunitas sehingga mampu mengidentifikasi kebutuhan lokal, menyusun program, membangun kolaborasi multipihak, serta mengakses berbagai peluang pendanaan yang tersedia (Hutasoit & Siregar, 2025).

Salah satu organisasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi tersebut adalah PATTIRO (*Pusat Telaah dan Informasi Regional*). Dalam pelaksanaan program *Small Grant FOLU* yang merupakan bagian dari kerja sama Indonesia–Norwegia untuk mendukung target *FOLU Net Sink 2030*, PATTIRO melaksanakan berbagai bentuk pendampingan, mulai dari sosialisasi program, identifikasi komunitas calon penerima manfaat, *coaching clinic* penyusunan proposal, hingga pendampingan finalisasi dan pengunggahan proposal. Melalui pendekatan tersebut, PATTIRO tidak hanya memperluas akses informasi mengenai pendanaan hijau, tetapi juga memperkuat kapasitas komunitas agar mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam mengakses skema pendanaan lingkungan.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa berbagai komunitas berhasil memperoleh pendanaan *Small Grant FOLU* untuk mendukung rehabilitasi lahan, konservasi keanekaragaman

hayati, pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat, dan pendidikan lingkungan. Namun demikian, proses pendampingan juga mengungkap masih adanya berbagai hambatan, seperti keterbatasan kapasitas penyusunan proposal, penyusunan rencana anggaran biaya, dokumentasi kelembagaan, literasi digital, hingga kemampuan memanfaatkan sistem pengajuan berbasis *online*. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan akses terhadap pendanaan hijau tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh keberadaan lembaga pendamping yang mampu memperkuat kapasitas komunitas secara berkelanjutan.

Meskipun penelitian mengenai *green financing* dan pembangunan berkelanjutan telah berkembang cukup pesat, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek kebijakan, instrumen keuangan, serta mekanisme pendanaan pada tingkat makro. Penelitian yang mengkaji bagaimana organisasi masyarakat sipil menjalankan fungsi *green governance* melalui strategi pendampingan untuk memperluas akses pendanaan hijau bagi komunitas berbasis lingkungan masih relatif terbatas. Padahal, fungsi *intermediary* yang dijalankan organisasi masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa prinsip partisipasi, inklusivitas, dan keadilan dalam *green governance* dapat diimplementasikan hingga tingkat komunitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi PATTIRO dalam mendorong akses pendanaan hijau bagi komunitas berbasis lingkungan melalui pendampingan program *Small Grant FOLU*. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan PATTIRO sebagai aktor *green governance* yang berperan sebagai *intermediary institution* dalam menjembatani komunitas dengan skema pendanaan hijau. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai tata kelola pendanaan lingkungan berbasis kolaborasi sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan akses komunitas terhadap berbagai sumber pendanaan hijau.



Gambar 1. [Instagram infopattiro](https://www.instagram.com/infopattiro)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa minat komunitas terhadap pendanaan lingkungan cukup tinggi, namun kapasitas dan akses masih terbatas. Dari 2.032 usulan, hanya 302 kelompok yang menerima pendanaan (14%). Tantangan utama meliputi akses informasi, penyusunan proposal, pemahaman mekanisme pendanaan, dan pelaporan program.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi yang dilakukan oleh PATTIRO dalam mendorong akses pendanaan hijau bagi komunitas berbasis lingkungan melalui

program pendampingan *Small Grant Forest and Other Land Use* (FOLU). Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengkaji secara komprehensif praktik pendampingan yang dilakukan PATTIRO sebagai organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat kapasitas komunitas untuk mengakses pendanaan lingkungan.

Lokasi penelitian berada pada program pendampingan *Small Grant FOLU* yang difasilitasi oleh PATTIRO pada tahun 2025–2026. Fokus penelitian diarahkan pada strategi pendampingan yang dilakukan PATTIRO mulai dari tahap sosialisasi program, identifikasi kelompok calon penerima manfaat, *coaching clinic* penyusunan proposal, hingga pendampingan finalisasi dan pengajuan proposal pendanaan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program yang diteliti. Informan terdiri atas *Program Officer* PATTIRO yang terlibat dalam pelaksanaan pendampingan, fasilitator atau pendamping komunitas, serta perwakilan komunitas penerima manfaat yang mengikuti proses pendampingan dan memperoleh akses pendanaan melalui program *Small Grant FOLU*.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan penelitian dan observasi terhadap proses pendampingan yang dilakukan PATTIRO. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi laporan kegiatan, proposal komunitas, dokumen program *Small Grant FOLU*, *policy brief*, publikasi PATTIRO, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan pembiayaan hijau, organisasi masyarakat sipil, dan pembangunan berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai strategi, proses pendampingan, tantangan, dan capaian yang diperoleh komunitas dalam mengakses pendanaan hijau. Kedua, observasi terhadap aktivitas pendampingan dan interaksi antara PATTIRO dengan komunitas dampingan. Ketiga, studi dokumentasi untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan implementasi program dan hasil pendampingan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, dan pengelompokan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi, matriks, dan kategorisasi tematik untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang muncul dari hasil analisis data.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari PATTIRO, pendamping komunitas, dan komunitas penerima manfaat. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh temuan penelitian yang lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan mengenai strategi PATTIRO dalam mendorong akses pendanaan hijau bagi komunitas berbasis lingkungan melalui Program Small Grant Indonesia FOLU Net Sink 2030. Temuan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan konsep *Strategic Planning* menurut Bryson (2018) untuk melihat bagaimana PATTIRO mengidentifikasi kebutuhan komunitas, mengimplementasikan strategi pendampingan, mencapai keberhasilan program, menghadapi berbagai tantangan, serta menjalankan perannya sebagai organisasi pendamping dalam memperkuat kapasitas komunitas mengakses pendanaan hijau. Uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasannya disajikan sebagai berikut.

Hasil

Strategi PATTIRO dalam Mendorong Akses Pendanaan Hijau bagi Komunitas Berbasis Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, PATTIRO berperan sebagai organisasi masyarakat sipil yang melakukan pendampingan kepada komunitas berbasis lingkungan agar mampu mengakses pendanaan hijau melalui Program Small Grant Indonesia FOLU Net Sink 2030. Pendampingan dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi program, *coaching clinic*

penyusunan proposal, pendampingan administrasi, review proposal, hingga pengajuan proposal kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH).

Program Small Grant Indonesia FOLU Net Sink 2030 merupakan program pendanaan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Berdasarkan hasil wawancara, besaran dana hibah yang diberikan kepada setiap kelompok bersifat beragam dengan nilai maksimal mencapai Rp50 juta per kelompok. Pada pelaksanaan Small Grant FOLU Net Sink Tahap IV, total dana hibah yang dialokasikan mencapai Rp7 miliar dengan target sekitar 200 kelompok masyarakat di seluruh Indonesia.

Pendampingan yang dilakukan PATTIRO diawali melalui kegiatan sosialisasi kepada komunitas mengenai tujuan program, persyaratan administrasi, mekanisme pengajuan proposal, serta tata cara penggunaan sistem pengajuan secara daring. Setelah proses sosialisasi, PATTIRO menyelenggarakan coaching clinic untuk membantu komunitas menyusun proposal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPD LH.

Selain penyusunan proposal, PATTIRO juga memberikan pendampingan dalam melengkapi dokumen administrasi, seperti legalitas organisasi, Surat Keputusan (SK) kepengurusan, profil organisasi, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta penyempurnaan substansi kegiatan agar proposal memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.

Hasil Pendampingan PATTIRO

Berdasarkan hasil wawancara, PATTIRO mendampingi sekitar 30 komunitas dari berbagai wilayah di Indonesia dalam proses pengajuan proposal pendanaan hijau. Dari jumlah tersebut, 15 komunitas berhasil lolos sebagai penerima hibah, sehingga tingkat keberhasilan pendampingan mencapai sekitar 50%.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa proses pendampingan mampu meningkatkan kualitas proposal yang diajukan oleh komunitas. Selain keberhasilan memperoleh pendanaan, komunitas juga mengalami peningkatan kapasitas dalam memahami mekanisme pendanaan hijau, penyusunan proposal, penyusunan anggaran kegiatan, serta pengelolaan administrasi organisasi.

Pendanaan yang diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan konservasi berbasis masyarakat, antara lain rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan ekonomi hijau, edukasi lingkungan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi.

Tantangan Pendampingan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa PATTIRO masih menghadapi beberapa kendala selama proses pendampingan.

- Pertama, rendahnya kapasitas komunitas dalam memahami mekanisme pengajuan hibah pemerintah pusat. Sebagian besar komunitas telah memiliki gagasan kegiatan konservasi, namun belum mampu menuangkannya dalam bentuk proposal sesuai ketentuan BPD LH.
- Kedua, banyak komunitas belum memiliki kelengkapan administrasi organisasi, seperti legalitas, Surat Keputusan kepengurusan, profil organisasi, maupun dokumen pendukung lainnya sehingga memerlukan pendampingan tambahan.
- Ketiga, komunitas yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih mengalami keterbatasan akses internet sehingga sulit memperoleh informasi mengenai peluang pendanaan hijau maupun mengikuti proses pengajuan proposal secara daring.

Pembahasan

Strategi PATTIRO dalam Mengidentifikasi Kebutuhan Komunitas

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum melaksanakan pendampingan PATTIRO terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi komunitas dalam mengakses pendanaan hijau. Proses identifikasi dilakukan melalui komunikasi awal, diskusi, serta pemetaan kapasitas komunitas yang akan mengikuti Program Small Grant Indonesia FOLU Net Sink 2030. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar komunitas belum memiliki pengalaman mengakses pendanaan dari pemerintah pusat sehingga belum memahami mekanisme pengajuan hibah yang berlaku. Selain itu, banyak komunitas mengalami kesulitan dalam menyusun proposal sesuai format yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), belum memiliki dokumen kelembagaan yang lengkap seperti Surat Keputusan (SK), profil organisasi, maupun dokumen legalitas lainnya, serta menghadapi keterbatasan akses informasi mengenai peluang pendanaan hijau. Bagi komunitas yang berada

di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), keterbatasan jaringan internet juga menjadi hambatan dalam memperoleh informasi maupun mengikuti proses pengajuan proposal secara daring. Berdasarkan kondisi tersebut, PATTIRO kemudian memetakan kebutuhan masing-masing komunitas sehingga bentuk pendampingan yang diberikan dapat disesuaikan dengan tingkat kapasitas dan permasalahan yang dihadapi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi pendampingan yang dilakukan PATTIRO diawali dengan proses identifikasi isu dan kebutuhan yang dihadapi oleh komunitas. Tahapan ini sejalan dengan konsep Strategic Planning yang dikemukakan oleh (Bryson, 2018), bahwa organisasi perlu mengidentifikasi isu strategis yang memengaruhi pencapaian tujuan organisasi sebelum menyusun strategi yang akan diterapkan. Dengan memahami kondisi komunitas secara langsung, PATTIRO dapat merancang program pendampingan yang lebih tepat sasaran.

Implementasi Strategi Pendampingan PATTIRO

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pendampingan yang dilakukan PATTIRO dilaksanakan secara bertahap melalui beberapa kegiatan yang saling berkaitan. Tahap awal dimulai dengan sosialisasi Program Small Grant Indonesia FOLU Net Sink 2030 untuk memberikan pemahaman kepada komunitas mengenai tujuan program, persyaratan administrasi, mekanisme pengajuan proposal, serta kriteria penerima pendanaan. Setelah itu, PATTIRO menyelenggarakan coaching clinic sebagai wadah pendampingan intensif bagi setiap komunitas dalam menyusun proposal kegiatan. Pendampingan tidak hanya berfokus pada penyusunan narasi proposal, tetapi juga mencakup penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), penyempurnaan substansi kegiatan, penyusunan indikator keberhasilan, pemenuhan dokumen administrasi dan legalitas organisasi, hingga proses review dan finalisasi proposal sebelum diajukan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara berulang sesuai kebutuhan masing-masing komunitas agar proposal yang diajukan memenuhi ketentuan administrasi maupun substansi yang telah ditetapkan.

Pendampingan tersebut tidak hanya berfokus pada penyelesaian dokumen administrasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan komunitas dalam menyusun proposal yang memiliki substansi kuat dan sesuai dengan ketentuan program. Melalui coaching clinic, komunitas memperoleh masukan secara langsung mengenai penyempurnaan ide kegiatan, penyusunan indikator keberhasilan, hingga penyusunan anggaran yang realistis.

Strategi yang diterapkan PATTIRO menunjukkan bahwa implementasi strategi dilakukan secara sistematis melalui serangkaian program kerja yang saling berkaitan. Kondisi ini sejalan dengan teori Bryson (2018) yang menjelaskan bahwa strategi yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan melalui tindakan nyata agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Keberhasilan Strategi Pendampingan PATTIRO

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pendampingan yang dilakukan PATTIRO menunjukkan hasil yang cukup baik dalam meningkatkan peluang komunitas memperoleh pendanaan hijau. Berdasarkan hasil wawancara, PATTIRO mendampingi sekitar 30 komunitas dari berbagai daerah di Indonesia dalam proses penyusunan proposal Program Small Grant Indonesia FOLU Net Sink 2030 Tahap IV. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 komunitas berhasil lolos sebagai penerima pendanaan atau memiliki tingkat keberhasilan sekitar 50%. Besaran dana hibah Small Grant yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersifat beragam dengan nilai maksimal mencapai Rp50 juta per kelompok. Pada pelaksanaan Small Grant FOLU Net Sink Tahap IV, total alokasi dana hibah mencapai Rp7 miliar yang ditargetkan untuk menjangkau sekitar 200 kelompok masyarakat di berbagai daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan PATTIRO mampu meningkatkan kualitas proposal komunitas sehingga memenuhi persyaratan administrasi maupun substansi yang ditetapkan dalam proses seleksi.

Selain meningkatnya jumlah proposal yang lolos pendanaan, proses pendampingan juga meningkatkan kapasitas komunitas dalam memahami mekanisme pendanaan hijau, menyusun proposal, melengkapi dokumen administrasi, serta mengelola kegiatan secara lebih baik. Pendanaan yang diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan konservasi berbasis masyarakat, seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan ekonomi hijau, dan pendidikan lingkungan.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa strategi pendampingan yang dilakukan PATTIRO tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendanaan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori Bryson (2018) yang menjelaskan bahwa strategi yang efektif mampu menghasilkan perubahan organisasi sekaligus

meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tantangan dalam Implementasi Strategi Pendampingan

Berdasarkan hasil penelitian, PATTIRO masih menghadapi berbagai tantangan selama proses pendampingan komunitas dalam mengakses pendanaan hijau. Tantangan terbesar berasal dari rendahnya kapasitas komunitas dalam memahami mekanisme pendanaan pemerintah pusat. Sebagian besar komunitas telah memiliki gagasan kegiatan konservasi yang baik, namun masih mengalami kesulitan dalam menuangkan ide tersebut ke dalam proposal yang sesuai dengan ketentuan BPD LH. Selain itu, banyak komunitas belum memiliki legalitas organisasi yang lengkap, seperti Surat Keputusan (SK), profil organisasi, maupun dokumen kelembagaan lainnya yang menjadi persyaratan utama dalam proses pengajuan hibah. Tantangan lain juga berasal dari keterbatasan akses informasi dan infrastruktur digital, khususnya bagi komunitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang mengalami kendala jaringan internet sehingga proses konsultasi, koordinasi, maupun pengajuan proposal secara daring sering mengalami hambatan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendampingan memerlukan waktu dan intensitas yang lebih besar dibandingkan dengan komunitas yang telah memiliki kapasitas kelembagaan yang baik.

Kondisi tersebut menyebabkan PATTIRO harus memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada setiap komunitas. Pendampingan tidak hanya dilakukan pada tahap penyusunan proposal, tetapi juga membantu komunitas melengkapi legalitas organisasi, memperbaiki substansi kegiatan, serta memberikan konsultasi secara berkelanjutan hingga proposal siap diajukan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan strategi sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal organisasi. Hal ini sejalan dengan teori Bryson (2018) yang menyatakan bahwa organisasi perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi implementasi strategi sehingga strategi dapat terus disesuaikan dengan dinamika lingkungan yang dihadapi.

Peran PATTIRO sebagai Organisasi Pendamping

Berdasarkan hasil penelitian, PATTIRO tidak hanya berperan sebagai organisasi yang memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan proposal, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung (*bridging institution*) antara komunitas dengan penyedia pendanaan hijau. Peran tersebut diwujudkan melalui penyebaran informasi mengenai peluang pendanaan, peningkatan kapasitas komunitas melalui sosialisasi dan coaching clinic, pendampingan penyusunan proposal, pemenuhan dokumen administrasi, hingga fasilitasi komunikasi antara komunitas dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Selain membantu komunitas memperoleh akses pendanaan, PATTIRO juga mendorong penguatan kapasitas kelembagaan agar komunitas mampu mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan PATTIRO tidak hanya meningkatkan peluang komunitas untuk memperoleh hibah, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendanaan hijau tidak hanya bergantung pada tersedianya skema hibah, tetapi juga pada keberadaan organisasi pendamping yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep Strategic Planning menurut Bryson (2018) yang menekankan bahwa keberhasilan organisasi publik dan nonprofit ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menjalankan misi, membangun kolaborasi, serta menciptakan nilai publik (*public value*) melalui strategi yang tepat. Oleh karena itu, strategi pendampingan PATTIRO tidak hanya meningkatkan akses pendanaan hijau, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pendampingan yang dilakukan PATTIRO dalam Program Small Grant Indonesia FOLU Net Sink 2030 telah berjalan secara sistematis melalui tahapan identifikasi kebutuhan komunitas, sosialisasi program, coaching clinic, pendampingan penyusunan proposal, hingga proses finalisasi pengajuan pendanaan. Strategi tersebut berhasil meningkatkan kapasitas komunitas dalam memahami mekanisme pendanaan hijau, melengkapi persyaratan administrasi, serta menyusun proposal

yang sesuai dengan ketentuan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekitar 30 komunitas yang didampingi, sebanyak 15 komunitas atau sekitar 50% berhasil memperoleh pendanaan melalui Program Small Grant FOLU Net Sink 2030 Tahap IV. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan PATTIRO tidak hanya berorientasi pada keberhasilan memperoleh hibah, tetapi juga pada penguatan kapasitas komunitas agar mampu mengakses pendanaan hijau secara mandiri dan berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa PATTIRO masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas komunitas dalam menyusun proposal, belum lengkapnya legalitas organisasi, serta keterbatasan akses informasi dan infrastruktur digital, khususnya bagi komunitas di wilayah 3T. Meskipun demikian, melalui strategi pendampingan yang komprehensif, PATTIRO mampu menjalankan perannya sebagai *bridging institution* yang menghubungkan komunitas dengan penyedia pendanaan hijau sekaligus memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan teori Strategic Planning menurut Bryson (2018) yang menekankan pentingnya identifikasi isu strategis, implementasi strategi, serta penguatan kapasitas organisasi dan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, strategi pendampingan PATTIRO terbukti berkontribusi dalam meningkatkan akses komunitas terhadap pendanaan hijau sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola lingkungan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Referensi

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. Wiley.
<https://books.google.co.id/books?id=xqVFDwAAQBAJ>
- Desa, D. I., & Serai, P. (2024). *No Title*. 08(04), 1–7.
- Jurnal, S., Sosial, I., Hutasoit, A. I., & Siregar, H. (2025). *Strategi Pengorganisasian Masyarakat oleh Yayasan Srikandi Lestari dalam Mengampanyekan Isu Perubahan Iklim*. 4(4), 1085–1094.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i4.6229>
- Pembiayaan Berparadigma Green Financing Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan*. (2024). 4(1), 193–203. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3753>
- Pratama, B. A., & Firmansyah, A. (2024). *PEMBIAYAAN HIJAU: AKSELERASI PEMBANGUNAN dituangkan dengan meratifikasi hasil konvensi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Republik In*. 4(1), 150–160.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. 7(2), 1461–1471. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Rusanda, N., Indriana, H., & Falatehan, S. F. (2025). *Partisipasi Masyarakat dalam Adaptasi terhadap Perubahan Iklim : Keberlanjutan Program Kampung Iklim (Proklm) di Desa Cibanteng Community Participation in Adaptation to Climate Change : The Sustainability of the Program Kampung Iklim (Proklm) in Cib*. 09(03).